

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemerintah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola aset, keuangan serta kekayaan alam secara tertib dan taat peraturan, mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang akan maupun yang telah dilaksanakan. Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang.

Selain diterapkannya akuntabilitas publik, dalam pengelolaan keuangan pemerintah juga telah melakukan reformasi yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang Undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar ini menjadi prinsip prinsip dasar akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, di tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 64 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

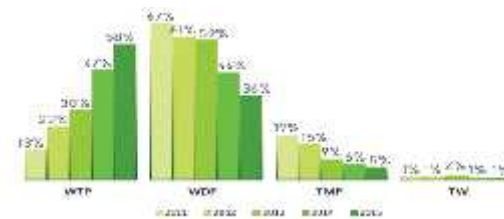
Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, akuntabel mengenai biaya yang dikeluarkan pemerintah serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (*decision maker*) didalam pemerintahan dengan menggunakan informasi yang relevan, dimana dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Di tingkat pemerintah daerah, bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tentu menjadi bagian yang sangat penting untuk pemerintah sehingga harus disusun sesuai dengan standarnya. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan juga dapat menjadi satu bahan evaluasi, perencanaan maupun pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya, laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan untuk menilai kinerja, alat pengambil keputusan dalam investasi dan sebagainya. Melihat begitu pentingnya laporan keuangan serta telah dikeluarkannya peraturan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai upaya perbaikan, pemerintah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap, transparan serta memiliki kualitas yang baik sehingga mampu menjadi informasi yang dapat diandalkan.

Dalam penilaian kualitas laporan keuangan, PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga telah dijelaskan bagaimana kriteria laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik. Kriteria tersebut dapat di lihat dari empat karakteristik yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi yaitu: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami. Baik buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah ini dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan serta penilaian lembaga independen dalam hal ini oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Menurut BPK, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk pemeriksaan keuangan, setelah diperiksa, BPK kemudian memberikan penilaian berupa opini yang meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), serta opini Tidak Wajar (TW) (<http://www.bpk.go.id>). Melalui opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah, maka dapat dilihat sebaik apa kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan data pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016 dapat dilihat persentase perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tahun 2011-2015 atas seluruh (542) LKPD sebagai berikut:

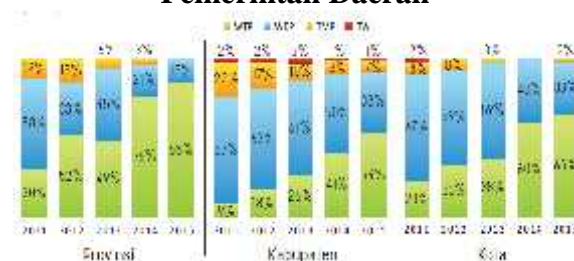
Gambar 1.1 : Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011-2015



Sumber : IHPS II Tahun 2016 (www.medan.bpk.go.id)

Dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada LKPD tahun 2011 menjadi 58% pada LKPD tahun 2015. Sementara itu LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 14 poin persen, dari 19% pada LKPD tahun 2011 menjadi 5% pada LKPD tahun 2015. Sedangkan berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada tahun 2016 terdiri atas 34 laporan keuangan pemerintah provinsi, 415 laporan keuangan pemerintah kabupaten, dan 93 laporan keuangan pemerintah kota dapat dilihat pada gambar 1.2¹.

Gambar 1.2 : Opini LKPD dari Tahun 2011-2015 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah



Sumber : IHPS II Tahun 2016 (www.medan.bpk.go.id)

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016**, Hal 109-110

Bila dilihat berdasarkan tingkat pemerintah daerah yaitu pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, peningkatan opini laporan keuangan juga tampak begitu baik. Di tingkat Provinsi laporan keuangan yang mendapat WTP naik dari 30% pada tahun 2011 menjadi 85% pada tahun 2015, pada tingkat Kabupaten naik dari 9% pada tahun 2011 menjadi 54% pada tahun 2015 dan tingkat kota naik dari 23% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015. Namun, meskipun secara umum kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan, masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengalami penurunan opini sebanyak 34 dari 542 LKPD, seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu penyelenggara pemerintah daerah yang setiap tahun juga mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan sebagai salah satu pengguna anggaran, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan juga akan menjadi perhatian. Menurut data yang dapat diakses melalui *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Kota Medan selama tahun 2012-2016 mendapat penurunan opini seperti yang terlihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan



Sumber : www.medan.bpk.go.id

Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Medan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya pada tahun tersebut laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Namun pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2014-2016 terjadi penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut berita yang di lansir di laman *website* Tribun-Medan (<http://medan.tribunnews.com>) terkait dengan Pemerintah Kota Medan Raih opini WDP dari BPK, Sekretaris Daerah Kota Medan menyebutkan bahwa: persoalan mengapa Pemerintah Kota Medan belum mendapatkan opini WTP, karena masih ada dokumentasi pencatatan aset yang kurang lengkap, akibat kesalahan dimasa lalu². Kesalahan dimasa lalu yang menyebabkan tidak lengkapnya dokumen pencatatan aset ini, dapat menjadi satu indikasi bahwa kemungkinan terjadinya penurunan opini laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan, belum dimanfaatkannya teknologi serta sumber daya manusia yang belum kompeten dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan (akuntansi).

Pelatihan dan pendidikan (diklat) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Banyak pihak yang berpendapat, diantara faktor faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas laporan keuangan adalah kurangnya perhatian instansi dalam memberikan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Pelatihan dan pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan demi menunjang peningkatan mutu pegawai. Perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, jelas mampu menjadi satu alasan bahwa

² Tribun-Medan.com **Pemko Medan Raih Opini WDP dari BPK**, website Tribun-Medan.com, <https://medan.tribunnews.com/2018/08/08/pemko-medan-raih-opini-wdp-dari-bpk>, diakses pada tanggal 09/07/2019

pendidikan dan pelatihan menjadi begitu penting untuk dilaksanakan. Dalam Undang Undang Aparatus Sipil Negara pasal 70 disebutkan, setiap pegawai Aparatus Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Undang Undang RI No. 5 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa dalam mengembangkan kompetensi, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan.

Kurangnya perhatian terhadap pengembangan mutu melalui pendidikan dan pelatihan tentu akan mempengaruhi pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah dengan diterapkannya ilmu yang telah diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tersebut. Setelah dilakukannya pendidikan dan pelatihan, seharusnya kemampuan pegawai akan semakin baik dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan logika akuntansi yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara umum. Semakin sering pegawai melakukan pelatihan, maka kemampuan yang dimiliki akan semakin baik, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan segala bentuk kesalahan ataupun kekeliruan pencatatan akan dapat dihindari. Pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini juga di perkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2016) tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan sertapengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan studi pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang

menyimpulkan bahwa: pendidikan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan³.

Kemudian pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi ini tentu dapat menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Teknologi dapat menjadi sarana pemrosesan, penyimpanan maupun penyebaran informasi bagi satu instansi guna menciptakan efektifitas dan efisiensi. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam keuangan, pemanfaatan teknologi ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan cara pengaplikasian *software* dan *hardware* sebagai sarana pemrosesan yang dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi berupa *hardware* dan *software*, satu instansi akan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Sekalipun

³ Hartati, **Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Serta Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah)**, E Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 9, 2016

dalam hal ini kesalahan itu ada, akan lebih cepat dan mudah diperbaiki dengan mengikuti prosedur *software* yang digunakan. Komputer akan mengerjakan perhitungan yang kompleks dengan lebih cepat, komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia sehingga hasilnya akan lebih dipercaya dibandingkan dengan jika dilakukan secara manual. Dalam penginputan data keuangan, aplikasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi.

Pemanfaatan teknologi sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ikhwanul Hanza (2008) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengawasan keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Daerah (*Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang*) yang menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan, Nabila Zubaidi et al (2019) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan telah memberikan hasil bahwa pemanfaatan teknologi berhubungan positif dan signifikan yang artinya bahwa pemanfaatan teknologi

yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan⁴ dan penelitian yang dilakukan oleh Ayang Darmawan dan Darwanis (2018) tentang pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumberdaya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa: pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan⁵. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung akan menjadi satu faktor penting yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi juga merupakan salahsatu faktor yang sangat menentukan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi merupakan kemampuan satu individu dalam melaksanakan tugas akuntansi atau keuangan dalam satu organisasi. Menurut Wati et al (2014) dalam Ida Ayu Enny Kirananyanti dan Ni Made Adi Erawati (2016): SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan⁶. Sumber daya manusia juga merupakan satu kunci yang mampu menentukan arah perkembangan satu organisasi. Sebagai

⁴Nabila Zubaidi et al, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, *International Journal of Social Science and Business*, Volume 3, Number 2, Tahun 2019, Hal 69

⁵Ayang Darmawan dan Darwanis, **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh**, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 3, No. 1, 2018

⁶ Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, **Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16.2. Agustus 2016, Hal 4

kunci utama perkembangan satu organisasi, sumber daya manusia haruslah memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mengerjakan pekerjaan dengan maksimal. Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas tentu didukung dengan latarbelakang pendidikan serta pengalaman kerja yang tinggi. Sama halnya dengan pendidikan dan pelatihan, kompetensi sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan cara diterapkannya kemampuan yang dimiliki secara langsung dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat, kekeliruan tersebut tentu akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak sinkron dengan data yang sebenarnya. Oleh sebab itu, jika sumber daya manusia sebagai penyusun laporan keuangan tidak kompeten, maka secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang disusun.

Keterkaitan kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini juga diperkuat oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh Triyanti (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan⁷ dan penelitian yang dilakukan oleh Dhedy Triwardana (2017) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi pada pemerintah daerah kabupaten Kampar) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah⁸.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk melihat apakah pendidikan dan pelatihan (diklat), pemanfaatan teknologi serta kualitas sumber daya manusia terutama di bidang akuntansi memiliki pengaruh terhadap kalitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Sehingga penelitian ini diberi judul : **“PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT), PEMANFAATAN TEKNOLOGI SERTA KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN”**

⁷Triyanti Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dibidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, (2017)

⁸ Dhedy Triwardana, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar), JOM Fekon, Vol. 4 No.1, 2017

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pelatihan dan pendidikan (diklat) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ?
- 3) Apakah kompetensi sumberdaya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ?
- 4) Apakah pelatihan dan pendidikan (diklat), pemanfaatan teknologi serta kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan dan batasan masalah diatas, dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk melihat dan mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan (diklat) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan,
2. Untuk melihat apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

3. Untuk melihat apakah kompetensi sumberdaya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
4. Untuk melihat apakah pendidikan dan pelatihan (diklat), pemanfaatan teknologi serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang apa saja yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan khususnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan oleh satu badan/ organisasi dan disusun menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai alat dan tolak ukur untuk menilai dan memprediksi apa yang akan dicapai dikemudian hari. Menurut Hopwood (2004) dalam Nabila Zubaidi et al (2019) **“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan”**⁹. Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, **“laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”**¹⁰, sedangkan menurut Irfan Ikhwanul Haza (2008) **“laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh satu entitas”**¹¹.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan satu bentuk pertanggungjawaban yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

⁹ Nabila Zubaidi et al, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, *International Journal of Social Science and Business*, Volume 3, Number 2, 2019

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**

¹¹ Irfan Ikhwanul Haza, **Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Kualiras Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)**, Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2008, Hal 4

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh sebab itu laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya digunakan.

Dalam organisasi/instansi pemerintahan, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban disusun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini merupakan gabungan dari laporan keuangan OPD/SKPD.

Erlina et al (2015) mengemukakan:

Laporan keuangan SKPD adalah satu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) yang ada sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan¹².

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan gabungan dari laporan keuangan OPD/SKPD pemerintah telah disesuaikan dengan Standar yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PP No.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan

¹²Erlina et al, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Salemba Empat, Jakarta Selatan 2015, Hal 19

kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan¹³.

Laporan keuangan disajikan sekurang kurangnya satu kali dalam setahun dan wajib berisi segala informasi berupa upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode untuk kepentingan umum, akuntabilitas, manajemen, transparansi serta evaluasi kerja dimana semua hal tersebut akan mampu menjadi alat untuk memberikan putusan dan perencanaan selanjutnya.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Lillrank (2003) dalam As Syifa Nurillah (2014) laporan **“keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna¹⁴.”** Secara umum laporan keuangan berfungsi sebagai informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Fungsi laporan keuangan secara umum juga adalah menjadi peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**

¹⁴As Syifa Nurillah, **Pengaruh Kompetensi Kumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)**, Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP 2014 Hal 41

sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Seperti yang dijelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010, laporan keuangan memiliki fungsi dan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat seperti:

- a. **Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.**
- b. **Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.**
- c. **Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.**
- d. **Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.**
- e. **Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.**
- f. **Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan¹⁵.**

Selain itu, informasi tambahan termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan akan semakin jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, apabila laporan yang dihasilkan memiliki semua bentuk kriteria yang baik, maka laporan keuangan tersebut akan mampu menjadi alat yang berfungsi sebagai penentu kebijakan di pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.

¹⁵ Erlina et al, **Akuntansi keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Salemba Empat, Jakarta, 2017, Hal 20

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang mengandung semua bentuk kriteria kualitas laporan keuangan yang telah ditentukan melalui standar akuntansi. Laporan keuangan ini haruslah memiliki sifat relevan, artinya, laporan keuangan harus mampu mempengaruhi pengguna dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Kemudian andal, artinya, laporan keuangan yang disusun bebas dari pengertian yang menyesatkan pengguna dan menyajikannya secara jujur. Selanjutnya dapat dibandingkan, artinya, laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun pada periode sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan instansi lain pemerintah yang menggunakan standar yang sama dan dapat dipahami yang artinya, segala informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan telah disesuaikan dengan istilah yang disepakati dalam standar yang telah ditentukan. Keempat kriteria ini dimaksudkan agar laporan keuangan mampu memberikan informasi dengan tepat dan terukur seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

Elvin Andrianto (2017) mengatakan bahwa:

Kualitas laporan keuangan merupakan taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode¹⁶.

¹⁶ Elvin Andrianto, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hal 15

Sedangkan menurut ssbelajar.net (2012):

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi¹⁷.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan satu taraf dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi bentuk informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang terjadi dalam satu periode. Laporan keuangan yang memiliki keempat karakteristik kualitas tersebut tentunya akan mampu memberikan informasi dan dapat digunakan menjadi alat perencanaan serta pengambilan keputusan.

Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan memang sudah semestinya disusun sesuai dengan prinsip yang mengandung semua karakteristik kualitas laporan keuangan. Dengan melekatnya semua karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, pemerintah akan semakin efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan serta semakin menunjukkan sikap akuntabel dan transparannya dalam mengelola keuangan pemerintah yang dipercayakan oleh pemberi amanah yaitu masyarakat, sehingga segala bentuk informasi mengenai posisi sumber daya, kewajiban, ekuitas, maupun perubahan posisi sumber daya, realisasi, alokasi maupun pendanaan dapat dilihat dan dinilai kinerjanya.

¹⁷Ssbelajar.net, **Kualitas Laporan Keuangan,** dalam web
<http://www.ssbelajar.net/2012/04/kualitas-laporan-keuangan.html>, diakses pada tanggal
23/08/2019

2.1.3.2Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan yang disusun oleh masing masing OPD/SKPD akan dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan laporan yang akan dikonsolidasikan ini tentunya harus lengkap dan terdapat komponen komponen LKPD. komponen komponen tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah ini tentunya memiliki informasi yang berbeda sesuai dengan bentuk komponennya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisar sumber, alikasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah/pusat dimana laporan ini akan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan satu entitas dimana neraca ini berisi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

laporan operasional menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, peneluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas¹⁸.

Komponen komponen laporan keuangan tersebut akan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Namun, PP No. 71 Tahun 2010 juga menyebutkan bahwa tidak semua komponen dilaporkan oleh setiap entitas atau dengan kata lain adanya pengecualian terhadap komponen laporan keuangan yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi tertentu saja seperti:

- a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam hal ini, yang memiliki fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum Negara/Daerah.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas LKPD yaitu menurut PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, diantaranya:

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

1. Relevan,

laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) **Manfaatan umpan balik (*feedback value*)**
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreks ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b) **Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)**
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) **Tepat waktu**
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) **Lengkap**
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan keandalan yang ada.

2. Andal

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a) **Penyajian jujur**
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) **Dapat diverifikasi (*verifiability*)**
Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.
- c) **Netralitas**
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara intern dan eksternal. Perbandingan secara intern dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna¹⁹.

2.1.4 Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

2.1.4.1 Pengertian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan terlepas dari bagaimana proses manusia itu belajar, berfikir dan memahami satu problem untuk memperoleh jawaban. Proses tersebut mampu mengasah kemampuan individual manusia dalam memberikan nalar dan logika yang tepat sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terampil. Sumber daya manusia yang terampil tentu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan banyak persoalan lingkungan, sains, maupun dunia pekerjaan seperti pemerintahan.

Untuk memperoleh sumber daya manusia yang terampil, tentu diperlukan satu cara yang tepat, mudah, efektif dan efisien. Salah satu cara paling tepat untuk dilakukan sesuai dengan kriteria tersebut adalah dengan dilakukannya pendidikan dan pelatihan. Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan merupakan cara yang tidak membutuhkan waktu begitu lama untuk dilaksanakan dalam meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam satu organisasi. UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “**Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,**

¹⁹ PP No. 71 Tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual 10-11

pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”²⁰. Beeby (1996:23) dalam H. Edy Sutrisno (2009) juga menyebutkan bahwa “pendidikan mempunyai kualitas tinggi bilamana keluaran pendidikan itu memiliki nilai bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan itu”²¹ sedangkan pelatihan Menurut Ivanchevic (2003) dalam H. Edy Sutrisno (2009) “merupakan satu usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lainnya yang akan dijabat dikemudian hari”²². As’ad (2001) dalam H. Edy Sutrisno (2009) juga mengemukakan bahwa “pelatihan menyangkut usaha usaha yang terencana yang diselenggarakan agar dicapainya penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sikap yang relevan terhadap pekerjaan”²³

Program pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dan berkesinambungan dapat mendorong para pegawai untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalismenya, sehingga akan berdampak pada kinerja yang pada akhirnya akan menciptakan cara kerja yang lebih baik serta efektif dan efisien. Profesionalisme ini juga akan menunjukkan nilai positif pada setiap hasil yang telah dikerjakan termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pegawai juga mampu memenuhi kriteria sebagai pegawai yang berwawasan tinggi, memiliki keterampilan, memiliki sikap/ perilaku yang baik serta memiliki keahlian yang cukup dalam mengemban tugas yang akan dikerjakan.

²⁰ UU RI No. 2 Tahun 1998 Tentang Sistem Pendidikan nasional

²¹ H. Edy Sutrisno, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta 2009, Hal 63-64

²² Ibid, Hal 67

²³ Ibid, Hal 68

2.1.4.2 Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Didalam pemerintahan, pendidikan dan pelatihan digolongkan menjadi beberapa jenis dan bentuk serta memiliki peran dan fungsi yang berbeda beda. PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pendidikan dan pelatihan yang di laksanakan dalam pemerintahan, diantaranya yaitu:

1. Diklat Prajabatan

Diklat prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Diklat prajabatan terdiri atas:

- a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
- b. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II;
- c. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III.

2. Diklat dalam jabatan

Diklat dalam jabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan , keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri atas:

- a. **Diklat kepemimpinan (Diklatpim), yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.**
- b. **Diklat fungsional, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.**
- c. **Diklat teknis, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kedua diklat tersebut (fungsional dan teknis) untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis yang bersangkutan²⁴.**

²⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 tahun 2000, **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.**

Penyusunan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi pembina pendidikan dan pelatihan. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan akan ditetapkan sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan serta jumlah peserta. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan secara klasikal atau non klasikal (dilakukan secara tatap muka atau tanpa tatap muka/jarak jauh).

2.1.4.3 Tujuan Serta Manfaat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap, pengabdian dan kesetiaan pada bangsa dan negara dimana salahsatunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan satu cara dan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai. Pendidikan dan pelatihan ini tentunya memiliki tujuan yang sesuai dengan pengertian Pendidikan dan pelatihan (diklat) itu sendiri.

Menurut Mangkunegara (2007:45) dalam Andi Kamrida (2016) tujuan pendidikan dan pelatihan yaitu:

- 1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi.**
- 2. Meningkatkan produktivitas kerja.**
- 3. Meningkatkan kualitas kerja.**
- 4. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia.**
- 5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja.**
- 6. Meningkatkan perkembangan pegawai²⁵.**

²⁵ Andi Kamrida, **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Mitra Wacana Media, Jakarta 2016, Hal 60

Sedangkan menurut PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS, tujuan dilakukannya diklat adalah untuk:

- a) **Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.**
- b) **Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.**
- c) **Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.**
- d) **Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik²⁶.**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan serta manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, sikap dan moral, mengembangkan pengetahuan, keterampilan untuk mencapai satu prestasi kerja, pertumbuhan, maupun tanggungjawab pegawai dalam menjalankan tugasnya serta menciptakan kesamaan visi dan pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

2.1.4.4 Indikator Pendidikan dan Pelatihan

Menurut PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, indikator yang digunakan dalam mengukur pendidikan dan pelatihandiantaranya:

1. Wawasan, yaitu pengetahuan yang dimiliki setelah dilakukannya pendidikan dan pelatihan.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan yang dimiliki setelah dilakukannya upaya peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Sikap/perilaku, yaitu kumpulan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku terhadap satu objek atau kelompok.

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang **Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai begeri Sipil**

4. Keahlian, yaitu tanggung jawab yang dibebankan untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Andi Kamrida (2016) indikator yang dapat mengukur pendidikan dan pelatihan yaitu:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Perubahan sikap

Berdasarkan uraian diatas, indikator pendidikan dan pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan karena Undang Undang atau Peraturan Pemerintah merupakan pedoman pemerintahan itu sendiri.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi

2.1.5.1 Pengertian Teknologi

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak hal.

Saat ini perkembangan teknologi telah menjadi salah satu hal yang wajib disadari oleh siapa saja. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa kini). Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Perkembangan teknologi yang saat ini terus terjadi semakin mewajibkan manusia untuk lebih menguasai dan memanfaatkannya. Teknologi kini tidak hanya sebatas mesin dan komputer. Saat ini, teknologi artifisial pun sudah banyak dikembangkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Oleh sebab itu, salah satu hal yang paling mendasar yang wajib dilakukan adalah menguasai teknologi dan memanfaatkannya dalam proses kerja.

2.1.5.2 Pengertian Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi merupakan penggunaan seperangkat alat yang terkomputerisasi dan mampu mengolah data secara virtual. Menurut KBBI, “Pemanfaatan merupakan proses atau cara atau perbuatan memanfaatkan”. Pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data dan informasi secara elektronik dan dapat diakses secara mudah dengan jaringan internet.

Reno Julia utama (2017) mengemukakan:

Pemanfaatan teknologi adalah pemberdayaan sumber alat alat yang ada dengan tujuan dan konsep yang sistematis yang berguna untuk

mengolah data, memproses, mendapatkan, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas²⁷.

Sedangkan Hanoni (2016) mengemukakan bahwa **“pemanfaatan teknologi adalah perilaku sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan mempercepat proses kerja”²⁸**. Pemanfaatan teknologi tentunya akan sangat membantu setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam pengoperasian satu organisasi. Dengan dimanfaatkannya teknologi, keterbukaan informasi akan sangat mudah didapatkan, cepat, tepat dan mampu dengan mudah dikelola atau diolah serta mempermudah proses dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan apabila dalam hal ini tidak dilakukannya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan tugas/kegiatan organisasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan pemanfaatan serta pemberdayaan sumber daya dalam mengelola data, memproses, mendapatkan, menyimpan, memanipulasi data untuk kemudahan penyelesaian tugas atau masalah yang ingin dipecahkan. Teknologi yang saat ini menjadi hal wajib untuk dimanfaatkan adalah komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang terkandung didalamnya serta jaringan internet. Pemanfaatan perangkat keras (*Hardware*) maupun perangkat lunak (*Software*) serta jaringan internet dalam dunia kerja, termasuk dalam keuangan, tentukan

²⁷ Reno Julia Utama, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri hulu)**, JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 2017

²⁸ Harnoni, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Anambas)**, Jom FEKON Vol. 3 No. 1 2016

sangat berguna untuk memproses data masukan sehingga menghasilkan output yang tidak cacat atau memiliki kesalahan.

Didalam organisasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi sebenarnya sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan mampu menyalurkan informasi mengenai posisi keuangan atau informasi keuangan lainnya kepada publik sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah terhadap apa yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri.

2.1.5.3 Fungsidan Tujuan Pemanfaatan Teknologi

Teknologi berfungsi untuk menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, atau transmisi. Teknologi mengkompilasikan catatan rinci aktivitas input dan dikelola menjadi output. Mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelolaan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis, perhitungan, sintesis (penggabungan) segala bentuk data informasi. Selain itu teknologi juga berfungsi untuk menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, table, ataupun grafik. Sedangkan tujuan pemanfaatan teknologi adalah untuk memecahkan satu masalah,

membuka kreatifitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Dengan adanya teknologi, pekerjaan akan semakin mudah dikerjakan. Menurut Sutarman (2012:19) dalam Firdaus et al (2015) dengan dimanfaatkannya teknologi, maka pekerjaan akan lebih cepat, tepat, dan andal. Komputer akan mengerjakan perhitungan yang kompleks dengan lebih cepat, computer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia sehingga hasilnya akan lebih dipercaya disbanding dengan jika dilakukan secara manual²⁹. Untuk keuangan sendiri, teknologi telah dikembangkan kedalam bentuk software keuangan yang mampu mengolah penyusunan data keuangan sehingga menghasilkan laporan yang dengan mudah dapat disusun.

Melalui software keuangan, pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi akan dipermudah untuk menyusun laporan keuangan. Dalam penginputan data keuangan, aplikasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Oleh sebab itu teknologi pada dasarnya adalah satu media yang memiliki fungsi sebagai alat pembantu yang mampu meringankan pekerjaan manusia dan alat yang mampu mengolah data dengan lebih cepat, tepat, mudah, efektif serta efisien.

²⁹ Firdaus et al, **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh**, Jurnal Magister Akuntansi, Vol 4, No. 1 2015

2.1.5.4 Indikator Pemanfaatan Teknologi

Menurut Suyanto (2005:11) dalam Elvin Andrianto (2017) Pemanfaatan teknologi dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

1. **Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)**, yaitu perangkat yang terdiri atas masukan dan keluaran sebagai unit menyimpan file file berupa catatan penting dan informasi.
2. **Perangkat Lunak (*Software*)**, yaitu perangkat yang dikembangkan untuk mendukung pendistribusian data dan informasi.
3. **Jaringan dan Komunikasi (internet)**, yaitu sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain³⁰.

Irfan Ikhwanul Haza (2008) juga menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi mencakup adanya penggunaan computer (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan internet³¹. Sedangkan menurut Winidyaningrum (2010) dalam Elvin Andrianto (2017) Pemanfaatan teknologi mencakup adanya:

1. **Pengolahan data, informasi sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.**
2. **Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat³².**

Sedangkan menurut Sukirman (2012) dalam Elvin Andrianto (2017), indikator pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut:

1. **Memiliki perangkat computer**
2. **Menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang undangan**
3. **Adanya pemeliharaan peralatan³³**

³⁰Elvin Andrianto, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)**,.. Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hal 24

³¹Irfan Ikhwanul Hanza, **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)** Artikel Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2008

³² Ibid, Hal 40

Berdasarkan uraian diatas, indikator pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahuluyaitu:

1. Penggunaan perangkat keras komputer (*hardware*)
2. Penggunaan perangkat lunak (*software*)
3. Penggunaan jaringan internet

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia Dibidang Akuntansi

2.1.6.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Menurut Ani Rahmaniari dan Soegijanto (2016) **“Akuntansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak principal untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode”**³⁴. Akuntansi senantiasa mengacu pada kegiatan memberikan pelaporan atau pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang telah diambil, biasanya oleh pihak yang menerima tugas kepada pihak yang memberikan tugas.

Ken Sabardiman Soetjipto (2016) mengemukakan:

Akuntansi (*Accounting*) adalah proses tiga aktivitas: identifikasi, pencatatan dan komunikasi (*identifying, recording and*

³³ Ibid, Hal 41

³⁴ Ani Rahmaniari dan Soegijanto, **Pengantar Akuntansi Dasar 1 Siklus Akuntansi (*Accounting Cycle*) Untuk Perusahaan Jasa**, In Media, Bogor 2016, Hal 2

***communicating*) peristiwa ekonomi sebuah organisasi (bisnis dan non bisnis) bagi pengguna informasi³⁵.**

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam bentuk informasi keuangan. Akuntansi memiliki beberapa standar ilmu yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pencatatan, penggolongan, maupun pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara.

Revrisond (2000) dalam Rachmat (2010) menyebutkan:

Akuntansi Pemerintahan dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Silihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah satu keterampilan dalam mencatat, menggolong golongkan, dan meringkas transaksi transaksi keuangan yang dilakukan oleh satu lembaga³⁶.

Sedangkan Deddi Nordiawan et al (2018) menyebutkan Akuntansi Pemerintahan merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan³⁷. Akuntansi pemerintahan di gunakan oleh pemerintah dalam menyusun dan melaporkan atau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan selama satu periode dan telah diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Laporan pertanggungjawaban

³⁵ Ken Sabardiman Soetjipto, **Akuntansi Suatu Pengantar**, Graha Ilmu, Yogyakarta 2016, Hal 1

³⁶ Rachmat, **Akuntansi Pemerintahan**, CV Pustaka Setia, Bandung 2010, Hal 18

³⁷ Dedi Nordiawan et al, **Akuntansi Pemerintahan**, Salemba Empat, Jakarta 2018, Hal 1

ini akan menjadi informasi yang sangat penting untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang.

2.1.6.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang menghasilkan output kerja yang unggul. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kemampuan seseorang atau individu, satu organisasi atau satu sistem untuk melaksanakan fungsi fungsi atau kapasitasnya untuk mencapai semua tugas dan tujuan secara cepat, tepat serta fleksibel dalam menilai satu masalah yang perlu dipecahkan solusinya dengan efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik dari seseorang atau individu yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan satu tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan posisi dan jabatan yang dimiliki oleh individu tersebut

Menurut Wibowo (2007) dalam Putri Oktavia et al (2015):

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut³⁸.

Menurut Yosefrinaldi (2013) dalam Alvin Andrianto (2017), “**kompetensi Sumber Daya Manusia ialah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan**

³⁸Putri Oktavia et al, Pengaruh Pendidikan Pelatihan dan pemahaman SAP Berbasis Akrual Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin, JSAI, 2015

bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai”³⁹. Sedangkan Dhedy Triwardana (2017), “kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”⁴⁰. Sedangkan menurut Triyanti (2017) “**kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan akuntansi**”⁴¹.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang unggul dan memiliki keterampilan yang baik, pengetahuan yang luas serta kemampuan yang maksimal untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang sedang dijabat. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk menjamin terlaksananya tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilai kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan satu fungsi termasuk akuntansi dapat dilihat dari *level of responsibility* dari sumber daya manusia tersebut. Selain itu kompetensi juga dapat dinilai melalui latar belakang pendidikan pengalaman ataupun pelatihan yang pernah dilakukan.

³⁹Elvin Andrianto, **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)**, Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hal 20

⁴⁰Dhedy Triwardana, **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)**, JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 2017

⁴¹Triyanti, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)**, Jurnal Akuntansi

2.1.6.3 Indikator Kompetensi SDM

Menurut Griffin (2004) dalam Elvin Andrianto (2017) Beberapa indikator yang dapat mengukur kompetensi SDM yaitu sebagai berikut:

1. **Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.**
2. **Pemahaman (*understanding*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien.**
3. **Keterampilan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas dan pekerjaannya.**
4. **Pengalaman, yaitu nilai satu individu yang diperoleh melalui jam kerja atau lamanya individu bekerja⁴².**

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam As Syifa Nurillah (2014), untuk menilai kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari:

1. *level of responsibility*
2. **Tanggung jawab**
3. **Jabatan⁴³.**

Berdasarkan uraian diatas, indikator kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dan dimodifikasi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
2. Pemahaman (*understanding*)
3. Keterampilan (*skill*)
4. Pengalaman
5. Latarbelakang pendidikan

⁴²Op.Cit, Hal 21

⁴³ Ibid, Hal 21

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang berfokus pada sector publik diantaranya, Ayang Darmawan dan Darwanis (2018), Hartati (2016), Nabila Zubaidi et al (2019), Reno Juli Utama (2017), Dhedy Triwardana (2017), Triyanti (2017), Ruri Windiastuti (2013), Merlyn C. T. Kalumata et al (2013), Putri Oktavia et al (2015), dan Elin Andrianto (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ayang Darmawan dan Darwanis (2018) dengan judul pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai sarana pengambilan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA provinsi Aceh.

Hartati (2016) dengan judul pengaruh pendidikan pelatihan teknis keuangan dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah) dengan menggunakan teknik kuisioner dan observasi untuk mengumpulkan data dan menyimpulkan bahwa pendidikan pelatihan teknis keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan dan Pendidikan pelatihan teknis dan pengalaman kerja secara bersama sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Nabila Zubaidi et al (2019) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan persamaan regresi linier yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Reno Juli Utama (2017) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri hulu). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner sebagai alat untuk memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Dhedy Triwardana (2017) dengan judul pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (Studi pada pemerintah daerah kabupaten Kampar). Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Kampar dengan menyebarkan kuisisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan standar akuntansi

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ruri Windiastuti (2013) dengan judul pengaruh Sumber daya manusia dibidang akuntansi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan instrument kuisisioner untuk memperoleh data. Penelitian ini menunjukkan adanya hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Triyanti (2017) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kabupaten magelang). Penelitian ini menggunakan instrument kuisisioner sebagai cara untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menyebarkan kuisisioner untuk memperoleh data penelitian. Hasil yang diperoleh yaitu kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah dan secara bersama sama kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Putri Oktavia el al (2015) dengan judul pengaruh Pendidikan dan pelatihan, pemahaman SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di kota banjarmasin dengan menyebarkan kuisisioner penelitian kepada pegawai untuk memperoleh data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang relevan dan telah disebutkan diatas juga dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ayang Darmawan dan Darwanis (2018)	Sistem Pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan	-Sistem Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -pemanfaatan teknologi, berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber : kumpulan jurnal tahun 2016-2019 (<https://scholar.google.co.id/>)

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
2	Triyanti (2017)	Kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan -Kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3	Ruri Windiastuti (2013)	Sumber daya manusia dibidang akuntansi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah -Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4	Merlyn C. T. Kalumata el al (2013)	Kompetensi sumber daya manusia, teknologi, reiew laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah proinsi Sulawesi utara	-Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -eknologi berpengaruh terhadap kualitas lapran keuangan -Kompetensi sumber daya manusia, teknologi, reiew laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah proinsi Sulawesi utara
5	Putri Oktavia el al (2015)	Pendidikan dan pelatihan, pemahaman SAP berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah kota banjarmasin	-Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh terhdap kualitas laoran keuangan -Pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -Pendidikan dan pelatihan, pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota banjarmasin
6	Elin Andrianto (2017)	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai ariabel moderasi (studi empiris pada SKPD di kabupaten sleman)	-Kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas lapora keuangan -Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
7	Hartati (2016)	Pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja dan kualitas laporan keuangan	-pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -Pendidikan, pelatihan teknis dan pengalaman kerja secara bersama sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : kumpulan jurnal tahun 2016-2019 (<https://scholar.google.co.id/>)

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
8	Nabila Zubaidi et al (2019)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Kualitas Laporan Keuangan	-kompetensi sumber daya manusia berhubungan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan -pemanfaatan teknologi berhubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan -Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Reno Juli Utama (2017)	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan -Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
10	Dhedy Triwardana (2017)	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan	-penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah -Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah -penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

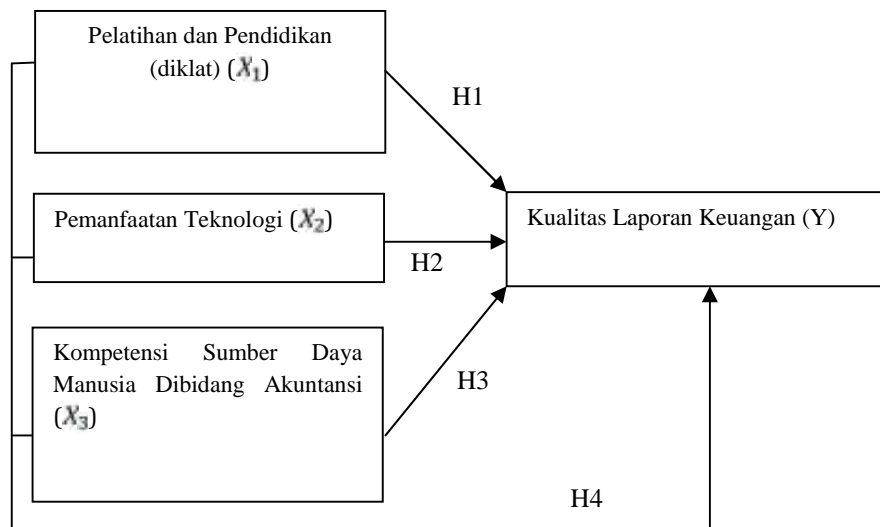
Sumber : kumpulan jurnal tahun 2016-2019 (<https://scholar.google.co.id/>)

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat (variabel dependen) yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah kota medan dengan variabel bebas (variabel independen) yaitu pelatihan dan pendidikan (diklat), pemanfaatan teknologi serta kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi. Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kerangka nerfikir ini akan menjadi paradig penelitian untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel terikat dengan variabel

bebasnya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Pelatihan dan pendidikan (diklat) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pelatihan dan pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan demi menunjang peningkatan mutu pegawai. Perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, jelas mampu menjadi satu alasan bahwa pendidikan dan pelatihan menjadi begitu penting untuk dilaksanakan. Tujuan dilakukannya pendidikan dan pelatihan adalah untuk

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, keahlian maupun sikap agar pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah dengan diterapkannya ilmu pengetahuan, keterampilan maupun keahlian yang telah diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tersebut. Setelah dilakukannya pendidikan dan pelatihan, seharusnya kemampuan pegawai akan semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, pegawai akan memiliki keahlian, wawasan serta keterampilan yang mampu mendorong kualitas kerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, sikap atau perilaku pegawai juga akan menjadi lebih baik dalam bekerja sehingga dalam menyusun laporan keuangan, pegawai akan mampu menerapkan disiplin logika akuntansi yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara umum.

Adanya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan ini telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2016) tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan, dimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis variabel X_1 yaitu:

H₁ : Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Pemanfaatan Teknologi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi baik pada internal maupun eksternal satu organisasi/instansi. Teknologi berfungsi untuk menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, atau transmisi. Teknologi mengkompilasikan catatan rinci aktivitas input dan dikelola menjadi output.

Dengan dimanfaatkannya teknologi, maka pekerjaan akan lebih cepat, tepat, dan andal. Komputer akan mengerjakan perhitungan yang kompleks dengan lebih cepat, komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia sehingga hasilnya akan lebih dipercaya dibanding dengan jika dilakukan secara manual. Dalam penginputan data keuangan, aplikasi akuntansi akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi kedalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi.

Dengan diterapkannya teknologi yang terkomputerisasi sebagai sarana penunjang dalam sebuah organisasi/instansi seperti penggunaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan internet, maka seharusnya akan mampu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan, karena apabila teknologi ini digunakan penyusunan laporan keuangan akan dapat dipermudah

dan kesalahan mampu dengan cepat terdeteksi sehingga hal ini akan bermuara pada baik/buruknya laporan keuangan yang disusun oleh penyusun laporan keuangan.

Adanya pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayang Darmawan dan Darwanis (2018) tentang pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA provinsi Aceh menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis variabel X_2 yaitu:

H₂ : Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dibidang Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Sebagai kunci utama perkembangan satu organisasi, sumber daya manusia haruslah memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mengerjakan pekerjaan dengan maksimal. kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang mampu melaksanakan satu pekerjaan, keterampilan yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan fungsi fungsi atau kewenangan dalam menghasilkan ouput kerja yang unggul. Kompetensi sumber daya manusia

yang berkualitas tentu didukung dengan latarbelakang pendidikan serta pengalaman kerja yang tinggi.

Sumber daya manusia yang unggul tentunya memiliki pengetahuan yang tinggi, pemahaman, keterampilan maupun pengalaman yang baik dalam banyak bidang maupun dalam satu bidang seperti akuntansi. Dengan diterapkannya semua bentuk pengetahuan, pemahaman atau pengalaman yang dimiliki dalam menyusun laporan keuangan, maka hasil yang akan diperoleh akan mampu menjadi lebih baik sehingga laporan yang disusun dapat informasi yang andal. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat, kekeliruan tersebut tentu akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak sinkron dengan data yang sebenarnya. Kompetensi sumber daya manusia sebagai penyusun laporan keuangan juga dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman ataupun pelatihan yang pernah dilakukan. Individu yang berlatar belakang keuangan tentu akan lebih kompeten dalam melaksanakan fungsi akuntansi dibandingkan individu dengan latar belakang berbeda dari keuangan. Selain itu, pengalaman dan bentuk pelatihan satu individu juga akan menjadi bentuk kompetensi yang tentunya bila diterapkan, akan mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun. Oleh sebab itu, jika sumber daya manusia sebagai penyusun laporan keuangan tidak kompeten, maka secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang disusun.

Adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibuktikan

dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Triyanti (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis variabel X_3 yaitu:

H₃ : Kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi dan Kompetensi SDM Dibidang Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Dengan dilakukannya pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai satu cara yang mampu meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun keahlian guna menunjang kinerja pegawai tentunya akan bermuara pada hasil kerja yang berkualitas seperti penyusunan laporan keuangan yang akan semakin baik. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, pegawai akan memiliki keahlian, wawasan serta keterampilan yang mampu mendorong kualitas kerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, sikap atau perilaku pegawai juga akan menjadi lebih baik dalam bekerja sehingga dalam menyusun laporan keuangan, pegawai akan mampu menerapkan disiplin logika akuntansi yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara umum. Apabila semua pegawai yang mengemban fungsi akuntansi/ keuangan memiliki keahlian dan

keterampilan, tentunya hal ini akan sejalan dengan hasil kerja seperti penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dengan meningkatnya kemampuan dan keahlian individu pegawai dalam menyusun laporan keuangan, hal ini akan semakin baik bila ditopang dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat pekerjaan. Dengan dimanfaatkannya teknologi sebagai satu sarana pendukung tentunya akan menciptakan efektifitas dan efisiensi kerja yang tentunya akan berpengaruh pada hasil kerja seperti penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Hal ini dikarenakan komputer dapat mengerjakan perhitungan yang kompleks dengan lebih cepat, komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia sehingga hasilnya akan lebih dipercaya dibanding dengan jika dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, apabila individu telah memperoleh pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bila hal itu juga dikombinasikan dengan memanfaatkan sumber daya teknologi yang terkomputerisasi tentu output berupa laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Hasil dari pendidikan dan pelatihan yang dikombinasikan dengan memanfaatkan teknologi ini kemudian akan menjadi hal yang sangat baik dan sangat tepat apabila diperkuat dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Kompetensi sumber daya manusia ini dapat dilihat melalui latar belakang pendidikan, pengalaman ataupun pelatihan yang pernah dilakukan. Individu yang berlatar belakang keuangan tentu akan lebih kompeten dalam melaksanakan fungsi akuntansi dibandingkan individu dengan latar

belakang berbeda dari keuangan. Oleh sebab itu, apabila ketiga hal ini dapat terlaksana dan dimiliki oleh setiap individu yang melaksanakan fungsi akuntansi/ keuangan, tentu akan semakin mampu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diberikan hipotesis yaitu:

H₄ : Pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif memakai pendekatan kausal yang bersifat sebab akibat dimana ada variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Menurut Husein Umar (2008) dalam Oloheta Waruwu (2019) menyebutkan penelitian kausal berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya⁴⁴.

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan pada bulan Agustus 2019 s/d selesai. Penulis memilih Pemerintah Kota Medan sebagai tempat riset karena laporan keuangan pemerintah Kota Medan mendapatkan penurunan opini dan ingin melihat apakah pendidikan dan pelatihan (diklat), pemanfaatan teknologi serta kompetensi sumberdaya manusia dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan menyebarkan kuisisioner keseluruhan (35) OPD/SKPD Pemerintah kota Medan.

⁴⁴Oloheta Waruwu, **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Peran audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Nias Barat**, Skripsi Akuntansi UHN 2019, Hal 49

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi secara etimologi dapat diartikan sebagai penduduk atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Menurut Bohar Soeharto (1993:85) dalam Mahi M. Hikmat (2014) **populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala gejala, benda benda, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya yang menjadi objek peelitian**⁴⁵ sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2014), populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan⁴⁶. Dari beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa populasi merupakan objek atau subjek untuk dipelajari yang meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangandan yang menyusun laporan keuangan di seluruh OPD Kota Medan (35 OPD). Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dipilih menjadi populasi dalam penelitian ini karena bagian fungsi akuntansi/tata usaha keuangan memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan setiap OPD pemerintah Kota Medan yang terdiri dari kepala bagian keuangan, bendagara penerimaan dan pengeluaran serta staff akuntansi. Daftar dan jumlah OPD Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1: Populasi Penelitian

No.	OPD	Kategori				Jumlah
		A	B	C	D	
SEKRETARIAT						

⁴⁵ Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra**, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014, Hal 60

⁴⁶ V. Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian**, Pustakabarupress, Yogyakarta 2014, Hal 65

1	Sekretariat Daerah	1	1	1	1	4
2	Sekretariat DPRD	1	1	1	1	4
3	Inspektorat	1	1	1	1	4
BADAN						
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	4
2	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	1	1	1	1	4
3	Badan Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	4
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	1	1	4
5	Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1	1	1	1	4
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	1	4
7	Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat	1	1	1	1	4
DINAS						
1	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4
2	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	4
3	Dinas Pekerjaan Umum	1	1	1	1	4
4	Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang	1	1	1	1	4
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1	4
6	Dinas Sosial	1	1	1	1	4
7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1	1	1	1	4
8	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	4
9	Dinas Ketenagakerjaan	1	1	1	1	4
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	1	4
11	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	1	1	4
12	Dinas Lingkungan hidup	1	1	1	1	4
13	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	1	1	1	1	4
14	Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	1	1	4
15	Dinas Perhubungan	1	1	1	1	4
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	1	1	1	1	4
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	1	1	4
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	1	1	1	1	4

No.	OPD	Kategori				Jumlah
		A	B	C	D	
19	Dinas Pertanian dan Perikanan	1	1	1	1	4
10	Dinas perindustrian	1	1	1	1	4

21	Dinas Perdagangan	1	1	1	1	4
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	1	1	4
23	Dinas Pariwisata	1	1	1	1	4
24	Dinas Kebudayaan	1	1	1	1	4
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	1	4
TOTAL		35	35	35	35	140

Keterangan:

- A. Kepala bagian keuangan
- B. Bendahara penerimaan
- C. Bendahara pengeluaran
- D. Staff akuntansi

3.2.2 Sampel

Menurut Jonathan Sarwono (2006) **Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari**⁴⁷ atau dengan kata lain sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi keseluruhan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pegawai dan para staf yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada OPD Pemerintah Kota Medan.

Penyampelan atas responden dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan.

⁴⁷ Jonathan Sarwono, **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif**, Graha Ilmu, Yogyakarta 2006, Hal 111

2. Bendahara (Bendahara penerimaan dan pengeluaran).
3. Pegawai/*Staff* bagian akuntansi.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka sampel yang diambil untuk menjadi audiens dalam penelitian ini diambil berdasarkan rumus slovin, yaitu :

$$n = N / (N(d)^2 + 1)$$

$$n = 140 / (140(0,05)^2 + 1)$$

$$n = 103$$

berdasarkan rumus tersebut, sampel pada penelitian ini sebanyak 103 orang yang tersebar di seluruh OPD Kota Medan(35 OPD). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan dana.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (2009) “Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. **Kuesioner merupakan satu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai satu masalah atau satu bidang yang akan diteliti**”⁴⁸. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing OPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada OPD tersebut.

3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

⁴⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta 2009, Hal 76

Menurut Syofian Siregar (2013) “Variabel adalah konstruk yang sifat sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah ubah”⁴⁹.

1. Variabel Terikat/*Dependent Variable* (Y)

Syofian Siregar (2013) mengemukakan “Variabel *dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabel respons atau endogen”. Variabel *dependent* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan (Y). Kualitas laporan keuangan merupakan satu taraf suatu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi satu informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang terjadi dalam satu periode. Laporan keuangan yang memiliki keempat karakteristik kualitas tersebut tentunya akan mampu memberikan informasi yang lengkap untuk digunakan menjadi alat perencanaan dan pengambilan keputusan. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diukur berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan dan (4) dapat dipahami.

2. Variabel Bebas/*Independent Variable* (X)

Variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini yang menjadi variabel *independent* adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) (X_1), pemanfaatan teknologi (X_2) serta kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi (X_3). Pendidikan dan pelatihan (diklat) (X_1) merupakan

⁴⁹ Syofian Siregar, **Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, Hal 10

satu cara yang cukup strategis dalam membant upaya peningkatan SDM satu organisasi sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu (1) wawasan, (2) keterampilan, (3) sikap/perilaku, dan (4) keahlian.

Pemanfaatan Teknologi X_2 merupakan pemanfaatan serta pemberdayaan sumber daya dalam mengelola data, memproses, mendapatkan, menyimpan, memanipulasi data untuk kemudahan penyelesaian tugas atau masalah yang ingin dipecahkan. Teknologi yang saat ini menjadi hal wajib untuk dimanfaatkan adalah komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang terkandung didalamnya serta jaringan internet. Pemanfaatan perangkat keras (*Hardware*) maupun perangkat lunak (*Software*) serta jaringan internet dalam dunia kerja, termasuk dalam keuangan, tentukan sangat berguna untuk memproses data masukan sehingga menghasilkan output yang tidak cacat atau memiliki kesalahan. Pemanfaatan teknologi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: (1) penggunaan perangkat keras (*hardware*), (2) penggunaan perangkat lunak (*software*) dan penggunaan jaringan.

Sedangkan kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi (X_3) merupakan karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang unggul dan memiliki keterampilan yang baik, pengetahuan yang luas serta kemampuan yang maksimal untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang sedang dijabat. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk menjamin terlaksananya tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilai kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan satu fungsi termasuk akuntansi dapat dilihat dari *level of responsibility* dari sumber daya manusia tersebut. Kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi dapat diukur dengan beberapa indikator

yaitu (1)pengetahuan, (2)pemahaman (3)keterampilan, (4)keterampilan dan (5)latarbelakang pendidikan

3.4.2 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan proses mendefinisikan variabel dengan tegas sehingga menjadi faktor faktor yang dapat diukur. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pendidikan dan pelatihan (diklat) (X_1), pemanfaatan teknologi (X_2) serta kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi (X_3) dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen (Y).

Tabel 3.2 : Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Butir
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)(X_1)	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satu cara yang cukup strategis dalam membant upaya peningkatan SDM satu organisasi sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> - Wawasan - Keterampilan - Sikap/perilaku - Keahlian 	Skala likert 1-5	8butir
Pemanfaatan Teknologi (X_2)	Pemanfaatan Teknologi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi baik pada internal maupun eksternal satu organisasi/instansi.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan perangkat keras komputer (<i>hardware</i>) - Penggunaan perangkat lunak (<i>software</i>) - Penggunaan jaringan 	Skala likert 1-5	7 butir
Kompetensi	kompetensi sumber daya	- Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	Skala	8 butir

Sumber Daya Manusia Dibidang Akuntansi (X_3)	manusia merupakan karakteristik, sikap dan perilaku dari orang-orang yang mampu melaksanakan satu pekerjaan, keterampilan yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan fungsi fungsi atau kewenangan dalam menghasilkan ouput kerja yang unggul.	-Pemahaman (<i>understanding</i>) - Keterampilan (<i>skill</i>) - Pengalaman - Latarbelakang pendidikan	<i>likert</i> 1-5	
--	---	--	-------------------	--

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Butir
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan merupakan satu tolak ukur yang menunjukkan konsistensi dan kelengkapan informasi dalam laporan yang disajikan	- relevan - andal - dapat dibandingkan - dapat dipahami	Skala <i>likert</i> 1-5	8 butir

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden dan dikumpulkan.

3.6 Skala Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala *likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini diukur dengan menyediakan lima alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang diberi skor 1-5. 1=Sangat Tidak Setuju (STS), 2= Tidak Setuju (TS), 3=Ragu Ragu (R)/Kurang Setuju (KS), 4=Setuju (S), 5=Sangat Setuju (SS).

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya satu instrument. Suatu instrumen yang valid dan sah mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya. Korelasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Product Moment Pearson*, sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{[\sum X^2 - (\sum X)^2][\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi *product moment*

N = jumlah responden

X = skor untuk masing masing item pernyataan

Y = jumlah skor keseluruhan dari seluruh item pernyataan untuk masing masing responden

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah satu indeks yang menunjukkan sejauh mana satu alat ukur tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kuisisioner dapat dikatakan reliable jika

jawaban atas pernyataan konsisten. Pengukuran reliabel dapat dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan bantuan program IBM SPSS dimana rumus yang digunakan yaitu:

$$r = \frac{k}{k-1} \frac{s_x^2 - \sum_j^k s_j^2}{s_x^2}$$

Keterangan :

r = koefisien reliabilitas

k = banyaknya jumlah item

s_j^2 = varian skor soal

s_x^2 = varian skor total

Nilai konstanta *Cronbach Alpha* adalah 0,70 maka jika instrument tersebut nilainya >0,70 dinyatakan reliabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terkait dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov* dengan melihat taraf signifikan 5% dengan bantuan program IBM SPSS. Dasar pengambilan keputusan dapat dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

Selain itu, untuk menguji normalitas data pada penelitian ini juga menggunakan metode *P-Plot*. Cara untuk mendeteksi normalitas dengan uji ini adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua variabel bebas (independen) atau lebih dalam sebuah regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan nilai toleransi (*Tolerance*) < 1 . Jika tolerance value dibawah 0,10 maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan uji grafik *Scatter Plot* yang terdapat dalam program computer *SPSS for*

windows. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi dari heteroskedastisitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap variabel Y.

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel dan melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Analisis berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat melalui perhitungan secara statistic dengan bantuan program IBM SPSS. Persamaan regresi berganda dirumuskan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstanta

X1 = Pendidikan dan pelatihan

X2 = Pemanfaatan teknologi

X3 = Kompetensi sumber daya manusia

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien X1, X2, X3

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2007 dalam As Siyfa Nurillah 2014). Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependen* (Ghozali 2005 dalam Ruri Windiastuti 2013)⁵⁰. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan menggunakan program IBM SPSS.

3.8.3 Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Atau dengan kata lain menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan sebesar 0,05 (=5%). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan) yang berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih besar dari maka hipotesis ditolak (koefisien

⁵⁰Ruri Windiastuti, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 2013, Hal 53

regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.4 Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji regresi simultan (Uji F) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara bebas dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha)0,05$ maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel} (\alpha)0,05$ maka hipotesis ditolak. Uji F dapat dilihat pada *output ANOVA* dari hasil statistik linear berganda dengan kriteria pengujian.